





# LAPORAN EKSEKUTIF

Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Nasional











#### Ringkasan Eksekutif Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai Analisis SKPG Rilis Juli 2025

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan salah satu tools early warning system sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Juli, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 3 provinsi (7,89%) pada kategori "rentan" yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Terdapat 16 provinsi (42,11%) dalam kategori aman, dan sebanyak 19 Provinsi (50,00%) dalam kategori waspada, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan tidak terdapat provinsi dalam kategori "rentan". Sedangkan sebanyak 19 provinsi (50,00%) dalam kategori waspada dan 19 provinsi (50,00%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 3 provinsi (7,90%) dalam kategori "rentan", yaitu: Şulawesi Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan 26 provinsi (68,42%) pada kategori waspada dan 9 próvinsi (23,68%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 6 provinsi (15,79%) dalam kategori "rentan", yaitu: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, terdapat 10 provinsi (26,32%) pada kondisi waspada, dan 22 provinsi (57,89%) dalam kondisi aman.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 67,51% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 8,37% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 22 provinsi (57,89%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 5 provinsi (13,16%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 11 provinsi (28,95%) tidak mengalami bencana. Untuk mengantisipasi/ kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.

> Jakarta, Agustus 2025 Plt. Sekretaris Utama

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.







# KERAWANAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)







#### **SITUASI SKPG RILIS JULI 2025\*:**

Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi bulanan merupakan hasil komposit dari aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan

**RENTAN** 3 Provinsi (7,89%): Papeg, Papsel, Papbar

**WASPADA** 19 Provinsi (50%):

Kep. Babel, Kep Riau, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Banten, NTT, Kalbar Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya

**AMAN** 16 Provinsi (42,11%)

# PETA ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN Rentan (0) Waspada (18) Peta Skor Ketersediaan SKPG

indikator 1: % luas tanam padi bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam padi bulan bersangkutan 5 tahun terakhir
 Indikator 2: % luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir

Peta Skor Keterjangkauan SKPG Indikator: % rata-rata harga bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata harga bulan yang sama 1 (satu) tahun sebelumnya untuk komoditas beras, minyak goreng dan telur

PETA ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN

Rentan (3)

Aman (9)

Waspada (26)



Indikator: Status Gizi Balita yang diukur melalui persentase balita underweight bulan bérjalan

\*) SKPG Rilis Juli 2025 disusun berdasarkan data olah Juni 2025





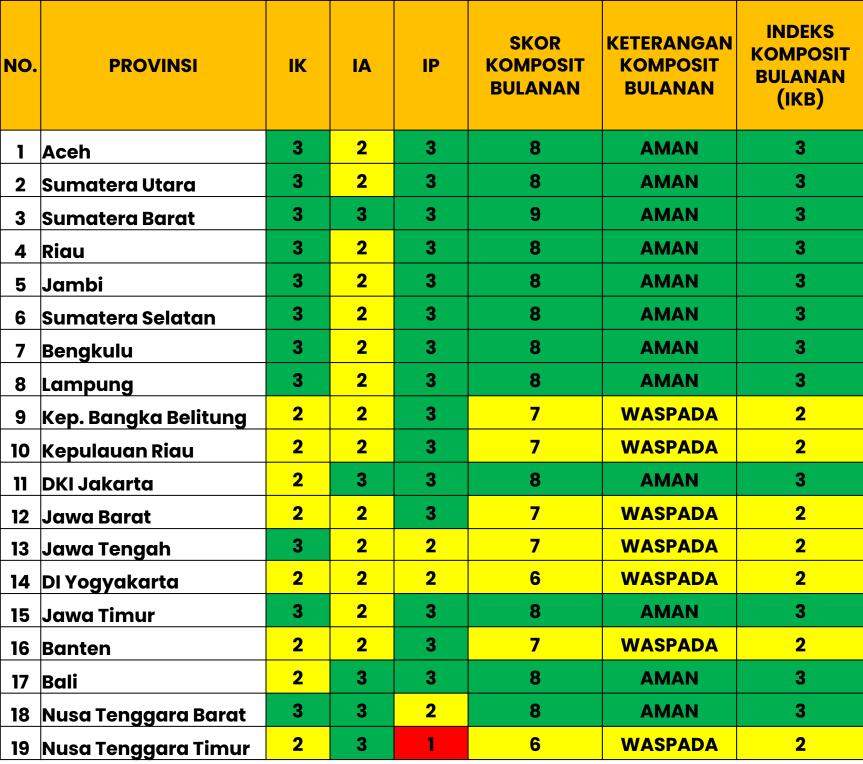






#### **DETAIL SITUASI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI PER PROVINSI**





| NO. PROVINSI          | IK | IA | IP | SKOR<br>KOMPOSIT<br>BULANAN | KETERANGAN<br>KOMPOSIT<br>BULANAN | INDEKS<br>KOMPOSIT<br>BULANAN<br>(IKB) |
|-----------------------|----|----|----|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 20 Kalimantan Barat   | 3  | 2  | 2  | 7                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 21 Kalimantan Tengah  | 2  | 2  | 3  | 7                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 22 Kalimantan Selatan | 3  | 2  | 2  | 7                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 23 Kalimantan Timur   | 2  | 3  | 2  | 7                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 24 Kalimantan Utara   | 3  | 2  | 3  | 8                           | AMAN                              | 3                                      |
| 25 Sulawesi Utara     | 2  | 2  | 3  | 7                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 26 Sulawesi Tengah    | 3  | 1  | 2  | 6                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 27 Sulawesi Selatan   | 3  | 2  | 3  | 8                           | AMAN                              | 3                                      |
| 28 Sulawesi Tenggara  | 3  | 2  | 3  | 8                           | AMAN                              | 3                                      |
| 29 Gorontalo          | 2  | 3  | 3  | 8                           | AMAN                              | 3                                      |
| 30 Sulawesi Barat     | 3  | 2  | 1  | 6                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 31 Maluku             | 2  | 2  | 2  | 6                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 32 Maluku Utara       | 2  | 2  | 3  | 7                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 33 Papua              | 3  | 2  | 1  | 6                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 34 Papua Pegunungan   | 2  | 1  | 2  | 5                           | RENTAN                            | 1                                      |
| 35 Papua Selatan      | 2  | 1  | 1  | 4                           | RENTAN                            | 1                                      |
| 36 Papua Tengah       | 2  | 3  | 2  | 7                           | WASPADA                           | 2                                      |
| 37 Papua Barat        | 2  | 2  | 1  | 5                           | RENTAN                            | 1                                      |
| 38 Papua Barat Daya   | 2  | 3  | 1  | 6                           | WASPADA                           | 2                                      |

Keterangan: : Indeks Ketersediaan

: Indeks Akses

: Indeks Pemanfaatan

- Skor Komposit Bulanan : IK + IA + IP









### **REKOMENDASI SESUAI HASIL SKPG PER PILAR ....(1/5)**







- 1. Bangka Belitung
- 2. Kepulauan Riau
- 3. DKI Jakarta
- 4. Jawa Barat
- 5. DI Yogyakarta
- 6. Banten
- 7. Bali
- 8. Nusa Tenggara Timur
- 9. Kalimantan Tengah
- 10. Kalimantan Timur

- 10. Sulawesi Utara
- 11. Gorontalo
- 12. Maluku
- 13. Maluku Utara
- 14. Papua Pegunungan
- 15. Papua Selatan
- 16. Papua Tengah
- 17. Papua Barat
- 18. Papua Barat Daya

- Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena berkuranganya luas tanam akibat alih fungsi lahan dan terjadinya puso akibat bencana dan iklim
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
- 3. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
- 4. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.
- 5. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim.
- Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh OPD yang menangani urusan pertanian Provinsi dan kabupaten/Kota











## > INDEKS KETERJANGKAUAN **KONDISI RENTAN**



- 1. Sulawesi Tengah
- 2. Papua Pegunungan
- 3. Papua Selatan

- 1. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
- 2. Koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah
- 3. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadai kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 1-2 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan











## **REKOMENDASI SESUAI HASIL SKPG PER PILAR .... (4/5)**



#### **STATUS WASPADA**

> INDEKS KETERJANGKAUAN KONDISI WASPADA



3. Riau 4. Jambi

5. Sumatera Selatan

6. Bengkulu

7. Lampung

8. Bangka Belitung

9. Kepulauan Riau

10. Jawa Barat

11. Jawa Tengah

12. DI Yogyakarta

13. Jawa Timur

14. Banten

15. Kalimantan Barat

16. Kalimantan Tengah

17. Kalimantan Selatan

18. Kalimantan Utara

19. Sulawesi Utara

20.Sulawesi Selatan

21. Sulawesi Tenggara

22. Sulawesi Barat

23.Maluku

24.Maluku Utara

25.Papua

26.Papua Barat

- Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
- 2. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
- 3. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadai kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada **2-4 bulan** berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan











# **PER PILAR .... (5/5)**



#### **STATUS RENTAN**

#### > INDEKS PEMANFAATAN KONDISI RENTAN



- 1. Nusa Tenggara Timur
- 2. Sulawesi Barat
- 3. Papua
- 4. Papua Selatan
- 5. Papua Barat
- 6. Papua Barat Daya

- Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15%, yaitu: 20,93% (65.371 balita) di NTT; 20,14% (14.073 balita) di Sulawesi Barat; 18,52% (2.241 balita) di Papua Barat Daya; 17,67% (2.853 balita) di Papua Selatan; 17,47% (2.708 balita) di Papua Barat; dan 15,47% (4.157 balita) di Papua;
- Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:
  - Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, BB sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.
  - Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita underweight dan balita yang tidak naik berat badannya.









## **REKOMENDASI SESUAI HASIL SKPG** PER PILAR ....(6/6)

#### **STATUS WASPADA**

> INDEKS PEMANFAATAN KONDISI WASPADA



- 1. Jawa Tengah
- 2. DI Yogyakarta
- 3. Nusa Tenggara Barat
- 4. Kalimantan Barat
- 5. Kalimantan Selatan
- 6. Kalimantan Timur
- 7. Sulawesi Tengah
- 8. Maluku
- 9. Papua Pegunungan
- 10. Papua Tengah

- 1. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita antara 10 15%.
- 2. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota terlampir.
- 3. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan OPD Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta









# Peta Situasi Iklim sebagai Dukung Iklim dalam Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)













# Ringkasan Data Dukung Iklim sebagai Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ....(1/2)

| Na  |                     | KAB/KOTA POTENSI KERING |           |          |         | KAB/KOTA POTENSI BASAH |          |          |         | KOMPOSIT KAB/KOTA POTENSI BASAH<br>& KERING |           |          |         |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|------------------------|----------|----------|---------|---|-----------|----------|---------|
| No. | PROVINSI            | Katego                  | ori Siaga | Kategori | Waspada | Katego                 | ri Siaga | Kategori | Waspada | Katego                                      | ori Siaga | Kategori | Waspada |
|     |                     | Σ                       | %         | Σ        | %       | Σ                      | %        | Σ        | %       | Σ   | %         | Σ        | %       |
| 1   | Aceh                | 1                       | 4,17      | 0        | 0,00    | 1                      | 4,17     | 15       | 62,50   | 2   | 8,33      | 14       | 58,33   |
| 2   | Sumatera Utara      | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 5                      | 15,63    | 22       | 68,75   | 5   | 15,63     | 22       | 68,75   |
| 3   | Sumatera Barat      | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 16       | 88,89   | 0   | 0,00      | 16       | 88,89   |
| 4   | Riau                | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 2                      | 16,67    | 10       | 83,33   | 2   | 16,67     | 10       | 83,33   |
| 5   | Jambi               | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 9        | 81,82   | 0   | 0,00      | 9        | 81,82   |
| 6   | Sumatera Selatan    | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 2                      | 11,76    | 14       | 82,35   | 2   | 11,76     | 14       | 82,35   |
| 7   | Bengkulu            | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 1                      | 10,00    | 9        | 90,00   | 1   | 10,00     | 9        | 90,00   |
| 8   | Lampung             | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 1                      | 6,67     | 10       | 66,67   | 1   | 6,67      | 10       | 66,67   |
| 9   | Bangka Belitung     | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 7        | 100,00  | 0   | 0,00      | 7        | 100,00  |
| 10  | Kepulauan Riau      | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 0        | 0,00    | 0   | 0,00      | 0        | 0,00    |
| 11  | DKI Jakarta         | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 4        | 16,67   | 0   | 0,00      | 4        | 66,67   |
| 12  | Jawa Barat          | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 2                      | 7,41     | 20       | 74,07   | 2   | 7,41      | 20       | 74,07   |
| 13  | Jawa Tengah         | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 2                      | 5,88     | 18       | 52,94   | 2   | 5,88      | 18       | 52,94   |
| 14  | DI Yogyakarta       | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 0        | 0,00    | 0   | 0,00      | 0        | 0,00    |
| 15  | Jawa Timur          | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 18       | 47,37   | 0   | 0,00      | 18       | 47,37   |
| 16  | Banten              | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 4        | 50,00   | 0   | 0,00      | 4        | 50,00   |
| 17  | Bali                | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 2        | 22,22   | 0   | 0,00      | 2        | 22,22   |
| 18  | Nusa Tenggara Barat | 0                       | 0,00      | 1        | 10,00   | 0                      | 0,00     | 3        | 30,00   | 0   | 0,00      | 4        | 40,00   |
| 19  | Nusa Tenggara Timur | 0                       | 0,00      | 1        | 4,55    | 0                      | 0,00     | 9        | 40,91   | 0   | 0,00      | 10       | 45,45   |
| 20  | Kalimantan Barat    | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 2                      | 14,29    | 12       | 85,71   | 2   | 14,29     | 12       | 85,71   |
| 21  | Kalimantan Tengah   | 0                       | 0,00      | 0        | 0,00    | 0                      | 0,00     | 14       | 100,00  | 0   | 0,00      | 14       | 100,00  |











# Ringkasan Data Dukung Iklim sebagai Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ....(2/2)

|     |                    | OTENSI KE | ERING    | KAB/KOTA POTENSI BASAH |         |        |          | KOMPOSIT KAB/KOTA POTENSI<br>BASAH & KERING |         |        |          |          |                      |
|-----|--------------------|-----------|----------|------------------------|---------|--------|----------|---|---------|--------|----------|----------|----------------------|
| No. | PROVINSI           | Katego    | ri Siaga | Kategori               | Waspada | Katego | ri Siaga | Kategori                                    | Waspada | Katego | ri Siaga | Kategori | <mark>Waspada</mark> |
|     |                    | Σ         | %        | Σ                      | %       | Σ      | %        | Σ   | %       | Σ      | %        | Σ        | %                    |
| 22  | Kalimantan Selatan | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 2      | 15,38    | 10  | 76,92   | 2      | 15,38    | 10       | 76,92                |
| 23  | Kalimantan Timur   | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 0      | 0,00     | 10  | 100,00  | 0      | 0,00     | 10       | 100,00               |
| 24  | Kalimantan Utara   | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 2      | 40,00    | 3   | 60,00   | 2      | 40,00    | 3        | 60,00                |
| 25  | Sulawesi Utara     | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 1      | 6,67     | 14  | 93,33   | 1      | 6,67     | 14       | 93,33                |
| 26  | Sulawesi Tengah    | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 2      | 15,38    | 10  | 76,92   | 2      | 15,38    | 10       | 76,92                |
| 27  | Sulawesi Selatan   | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 6      | 25,00    | 12  | 50,00   | 6      | 25,00    | 12       | 50,00                |
| 28  | Sulawesi Tenggara  | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 2      | 11,76    | 8   | 47,06   | 2      | 11,76    | 8        | 47,06                |
| 29  | Gorontalo          | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 0      | 0,00     | 5   | 83,33   | 0      | 0,00     | 5        | 83,33                |
| 30  | Sulawesi Barat     | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 0      | 0,00     | 6   | 100,00  | 0      | 0,00     | 6        | 100,00               |
| 31  | Maluku             | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 2      | 18,18    | 7   | 63,64   | 2      | 18,18    | 7        | 63,64                |
| 32  | Maluku Utara       | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 2      | 20,00    | 8   | 80,00   | 2      | 20,00    | 8        | 80,00                |
| 33  | Papua Barat        | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 3      | 23,08    | 10  | 76,92   | 3      | 23,08    | 10       | 76,92                |
| 34  | Papua              | 0         | 0,00     | 0                      | 0,00    | 2      | 6,90     | 27  | 93,10   | 2      | 6,90     | 27       | 93,10                |
|     | Total              | 1         | 0,19     | 2                      | 0,39    | 42     | 8,17     | 346   | 67,32   | 43     | 8,37     | 347      | 67,51                |

| KATEGORI          | Iklim: Potensi Basah |         |         |       |      |  |  |  |
|-------------------|----------------------|---------|---------|-------|------|--|--|--|
|                   | Kategori             | Aman    | Waspada | Siaga | Awas |  |  |  |
| Iklim:            | Aman                 | Aman    | Waspada | Siaga | Awas |  |  |  |
| Potensi<br>Kering | Waspada              | Waspada | Siaga   | Siaga | Awas |  |  |  |
|                   | Siaga                | Siaga   | Siaga   | Awas  | Awas |  |  |  |
|                   | Awas                 | Awas    | Awas    | Awas  | Awas |  |  |  |

- A. AMAN (WARNA HIJAU)
- B. WASPADA (WARNA
- C. SIAGA (WARNA JINGGA)
- D. AWAS (WARNA MERAH)
- : Kondisi iklim dikategorikan aman jika potensi kering dan basah **keduanya** menunjukkan kategori **aman**
- : Kondisi iklim dikategorikan waspada jika **hanya salah satu** potensi kering atau basah menunjukkan kategori waspada
- Kondisi iklim dikategorikan siaga jika:
- 1) salah satu potensi kering/basah: kategori siaga; atau
- potensi kering dan basah keduanya: kategori waspada
- : Kondisi iklim dikategorikan siaga jika:
  - salah satu potensi kering/basah: kategori awas; atau
- potensi kering dan basah keduanya: kategori siaga







## **Detail SKPG Per Provinsi dan** Data Dukung Informasi Kebencanaan .... (1/2)



|    |                     | STATUS  | RISIKO BI             | ENCANA |
|----|---------------------|---------|-----------------------|--------|
| NO | PROVINSI            | SKPG    | Σ KEJADIAN<br>BENCANA | STATUS |
| 1  | ACEH                | AMAN    | 21                    |        |
| 2  | SUMATERA UTARA      | AMAN    | 18                    |        |
| 3  | SUMATERA BARAT      | AMAN    | 6                     |        |
| 4  | RIAU                | AMAN    | 21                    |        |
| 5  | JAMBI               | AMAN    | 1                     |        |
| 6  | SUMATERA SELATAN    | AMAN    | 4                     |        |
| 7  | BENGKULU            | AMAN    |                       |        |
| 8  | LAMPUNG             | AMAN    | 5                     |        |
| 9  | BANGKA BELITUNG     | WASPADA | 1                     |        |
| 10 | KEPULAUAN RIAU      | WASPADA |                       |        |
| 11 | DKI JAKARTA         | AMAN    |                       |        |
| 12 | JAWA BARAT          | WASPADA | 22                    |        |
| 13 | JAWA TENGAH         | WASPADA | 11                    |        |
| 14 | DI YOGYAKARTA       | WASPADA |                       |        |
| 15 | JAWA TIMUR          | AMAN    | 9                     |        |
| 16 | BANTEN              | WASPADA | 6                     |        |
| 17 | BALI                | AMAN    | 1                     |        |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | AMAN    | 3                     |        |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | WASPADA | 2                     |        |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | WASPADA | 1                     |        |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | WASPADA | 5                     |        |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | WASPADA | 3                     |        |

|    |                   | STATUS  | RISIKO BENCANA        |        |  |  |
|----|-------------------|---------|-----------------------|--------|--|--|
| NO | PROVINSI          | SKPG    | Σ KEJADIAN<br>BENCANA | STATUS |  |  |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR  | WASPADA |                       |        |  |  |
| 24 | KALIMANTAN UTARA  | AMAN    |                       |        |  |  |
| 25 | SULAWESI UTARA    | WASPADA |                       |        |  |  |
| 26 | SULAWESI TENGAH   | WASPADA | 7                     |        |  |  |
| 27 | SULAWESI SELATAN  | AMAN    | 7                     |        |  |  |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | AMAN    | 4                     |        |  |  |
| 29 | GORONTALO         | AMAN    | 5                     |        |  |  |
| 30 | SULAWESI BARAT    | WASPADA |                       |        |  |  |
| 31 | MALUKU            | WASPADA | 6                     |        |  |  |
| 32 | MALUKU UTARA      | WASPADA | 7                     |        |  |  |
| 33 | PAPUA             | WASPADA | 1                     |        |  |  |
| 34 | PAPUA PEGUNUNGAN  | RENTAN  |                       |        |  |  |
| 35 | PAPUA SELATAN     | RENTAN  |                       |        |  |  |
| 36 | PAPUA TENGAH      | WASPADA |                       |        |  |  |
| 37 | PAPUA BARAT       | RENTAN  | 1                     |        |  |  |
| 38 | PAPUA BARAT DAYA  | WASPADA | 2                     |        |  |  |

| Status Warna | Σ Kejadian Bencana | Jumlah Provinsi | Persentase (%) |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|
|              | 0                  | 11              | 28,95          |
|              | 1 -10              | 22              | 57,89          |
|              | 11 – 50            | 5               | 13,16          |
|              | 50+                | 0               | 0,00           |





# Rekapituliasi Kejadian Bencana Di Bulan Juni 2025 .... (2/2)



| No | Jenis Bencana             | Jumlah Kejadian | Presentase (%) |
|----|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Kebakaran hutan dan lahan | 62              | 34,44          |
| 2  | Banjir                    | 60              | 33,33          |
| 3  | Cuaca Ekstrem             | 41              | 22,78          |
| 4  | Tanah longsor             | 12              | 6,67           |
| 5  | Kekeringan                | 4               | 2,22           |
| 6  | Gempa bumi                | 1               | 0,56           |
|    | TOTAL                     | 180             | 100,00         |

Kejadian bencana di bulan Juni didominasi akibat kebakaran hutan dan lahan sebanyak 62 kejadian (34,44%), dan akibat banjir sebanyak 31 kejadian (60%) dari total kejadian bencana sejumlah 180 kejadian.











## Informasi Kebencanaan







Jumlah kejadian bencana per tanggal 28 Juni 2025 tercatat sebanyak 1.746 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 99,36% dan bencana geologi 0,64% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, karhutla dan erupsi gunungapi.





JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS



#### DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2025

FASILITAS RUSAK-TOTAL: 439 UNIT **RUMAH RUSAK-TOTAL: 20.598 UNIT** KANTOR & JEMBATAN RUSAK-TOTAL: 217 UNIT 2.727 **RUMAH RUSAK BERAT** 263 SATUAN PENDIDIKAN RUSAK KANTORRUSAK **RUMAH RUSAK SEDANG** 4.356 204 **RUMAH IBADAT RUSAK** JEMBATAN RUSAK 143

FASILITAS YANKES RUSAK

No: 8/U163/099/Ben-Indonesia/BNPB/28062025



**RUMAH RUSAK RINGAN** 

13.515







## Infografis Kejadian Bencana (Juni 2025)

#### Infografis Kejadian Bencana (Juni 2025)





Selama bulan Juni 2025 telah terjadi 182 kejadian bencana yang menyebabkan 24 orang meninggal, 2 orang hilang dan 5 orang luka/sakit. Secara kumulatif, lebih dari 215.980 orang menderita & mengungsi. Bencana juga telah mengakibatkan 1.570 unit rumah mengalami kerusakan. Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Karhutla merupakan bencana yang dominan terjadi di bulan Juni. Korban meninggal paling banyak diakibatkan bencana tanah longsor. Kerusakan rumah paling banyak disebabkan oleh bencana cuaca ekstrem.

Peta Kejadian Bencana Bulan Juni 2025 Jumlah kejadian



Rekapitulasi Kejadian Bencana Periode: 1 Januari - 30 Juni 2025 1.784 kejadian bencana Menderita dan Mengungsi Meninggal dan hilang 308 jiwa 21.010 Unit rumah rusak 2.770 unit 4.460 unit Rumah Rusak Sedang Rumah Rusak Ringan Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Bulan Januari - Juni periode Tahun 2016 - 2025 Perbandingan Kejadian Bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Gelombang Pasang & Abrasi, Kebakaran Hutan & Lahan dan Kekeringan. Bulan Juni 2024 dan 2025



